

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Kabupaten Wonosobo

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 (tiga puluh lima) kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 98.468 Ha. Berjarak sekitar 120 km dari Semarang, ibukota Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 520 km dari Jakarta, ibukota negara. Kabupaten Wonosobo terbagi dalam 15 Kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan, dengan pembagian seperti tabel berikut:

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persen (%)	Desa	Kelurahan	Desa & Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	20
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,2	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Total		98.468	100	236	29	265

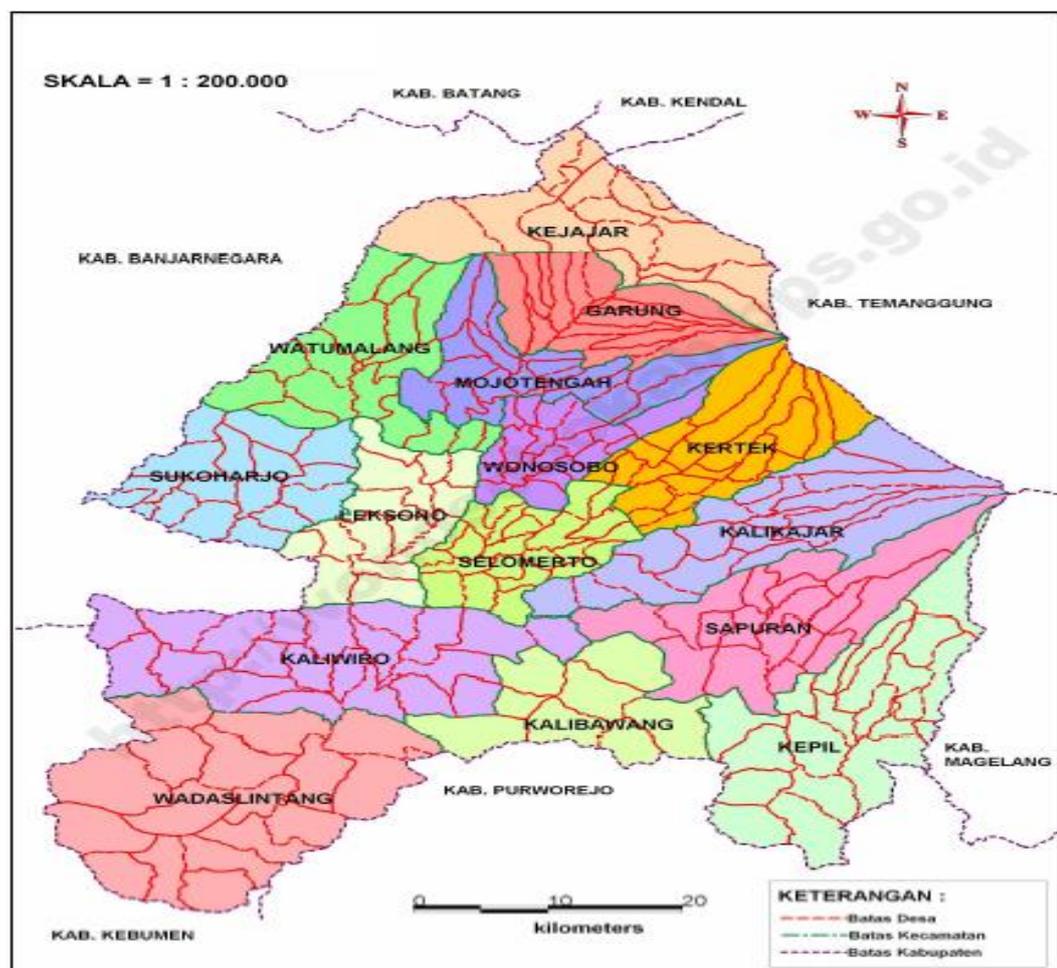
Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo, Tahun 2017

Batas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal, dan Batang.
- Sebelah timur : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen
- Sebelah barat : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Batas wilayah administrasi Kecamatan di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Wonosobo



Sumber: <http://wonosobokab.bps.go.id>

Secara astronomis Wonosobo terletak antara $7^{\circ}.43'.13''$ dan $7^{\circ}.04'.40''$ garis lintang selatan (LS) serta $109^{\circ}.43'.19''$ dan $110^{\circ}.04'.40''$ garis bujur timur (BT), pada

ketinggian 250 – 2.250 dari permukaan laut. Oleh karena itu, Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, pada jalur utama yang menghubungkan Cilacap – Banjarnegara – Temanggung – Semarang dari Purwokerto – Yogyakarta lewat Secang Magelang. Karena letaknya di persimpangan jalur tersebut, Wonosobo merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata di Jawa Tengah – DIY. Selain itu, karena berada di antara pusat – pusat pengembangan industri, yaitu Wonosobo, Surakarta, dan Cilacap, Wonosobo merupakan hinterland yang diterjemahkan sebagai potensi ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2. Iklim

Sebagai daerah beriklim tropis, Wonosobo hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2014 terjadi curah hujan yang fluktuatif selama 183 hari dan beragam menurut bulan. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan 798 mm, sedangkan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0 mm.

2.1.2. Aspek Sosial

2.1.2.1. Pendidikan

Dalam kurun lima tahun terakhir, tingkat partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo telah meningkat, baik perempuan maupun laki-laki. Keadaan ini cukup mengembirakan karena partisipasi sekolah memang diharapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Peningkatan penduduk yang bersekolah selama tahun 2012 – 2014 merupakan keberhasilan Kabupaten Wonosobo dalam upaya memperluas

pelayanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Wonosobo yang cenderung semakin meningkat. Selama kurun waktu tersebut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan dan laki-laki usia SD (7-12 tahun) dan usia SLTP (13-15 tahun) relatif sama. Ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan di Kabupaten Wonosobo telah mendapat kesempatan yang sama untuk duduk di bangku pendidikan dasar.

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2010-2014, capaian angka melek huruf terus mengalami peningkatan.

Tabel 2.2

Angka Melek Huruf 2010 – 2015 Kabupaten Wonosobo

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Capaian Melek Huruf	90,47	91,16	91,43	92,3	92,55	94,15

Sumber: *LPPD AMJ Kabupaten Wonosobo. 2010-2015*

Angka Melek Huruf (AMH) dari tahun ke tahun belum mencapai nilai 100%. Hal ini menunjukkan masih ada masyarakat Kabupaten Wonosobo yang buta huruf. Meskipun capaian Melek Huruf Kabupaten Wonosobo dari tahun 2011 hingga 2014 terus mengalami peningkatan, tetapi belum memenuhi target. Capaian Tahun 2014 hanya memenuhi target tahun 2011 dan dapat dikatakan jauh dari target tahun 2014.

b. Angka Melanjutkan Sekolah (AM)

Presentase siswa lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dalam kurun waktu Tahun 2010-2015 cenderung fluktuatif seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Angka Melanjutkan Sekolah

Indikator Kinerja	Capaian Kerja				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	88,96	89,78	88,49	91,03	91,4
Target Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	61,01	63	65	68	70
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	70,66	59,85	61,77	68,96	71,53
Target Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	68	70	74	78	80

Sumber: *LPPD AMJ 2010-2015*

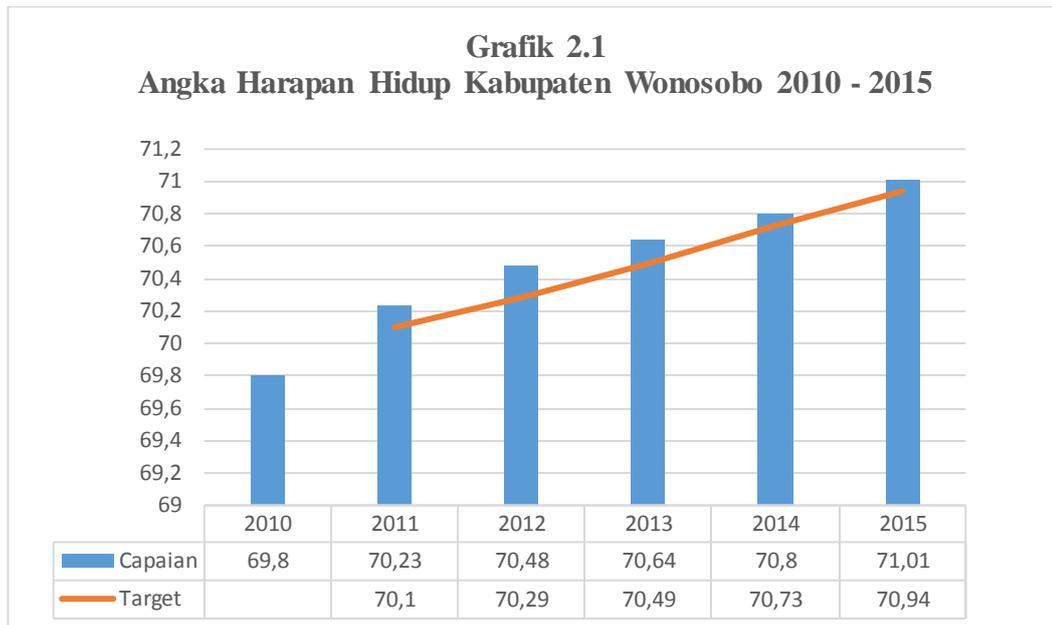
Berdasarkan tabel 2.3, pada tahun 2010 angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 94,85, kemudian angka melanjutkan pada tahun 2011 menurun menjadi 88,96%, dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 89,78. Namun pada tahun 2013, angka melanjutkan menurun mencapai nilai terendah dalam kurun waktu 2011 hingga 2014, yaitu 88,49. Pada tahun 2014, Angka Melanjutkan (AM) meningkat mencapai 91,03%. Peningkatan ini terus berlanjut hingga pada tahun 2015 mencapai 91,4 dan sudah mencapai target RPJMD tahun 2010-2015. Hal ini berarti masih ada 8,7% lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah hingga SMP.

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011 hingga 2014 cenderung menurun. Nilai tertinggi pada tahun 2011 yang mencapai 70,66% lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, kemudian menurun drastis pada tahun 2012 hingga mencapai 59,85% yang berarti 39,15% lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah. Tahun 2013 dan 2014 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terus meningkat hingga tahun 2014 mencapai 68,96. Hal ini berarti 31,04% lulusan SMP tidak melanjutkan sekolah. Meskipun pada tahun 2015, Angka Melanjutkan ke SMA/MA sudah meningkat menjadi 71,53, namun angka ini masih jauh dari target RPJMD tahun 2010-2015.

2.1.2.2. Kesehatan

a. Angka Usia Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka harapan hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Dalam kurun waktu Tahun 2010 – 2014, Usia Harapan Hidup di Wonosobo sebesar 69,8 tahun meningkat menjadi 70,8 tahun. Meningkatnya Usia Harapan Hidup penduduk di Wonosobo disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kesehatannya melalui perilaku hidup bersih dan sehat.



Sumber: *LPPD AMJ 2010-2015*

: *Evaluasi Capaian Tahun Ketiga (2013) RPJMD*

Berdasarkan grafik 2.1 capaian Angka Harapan Hidup selalu lebih tinggi dibandingkan target RPJMD 20-2015 dan diikuti pula dengan peningkatan harapan hidup setiap tahun. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Wonosobo.

b. Prosentase Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2014 mengalami fluktuasi. Prosentase balita gizi buruk terendah pada tahun 2013 sebesar 0,015% (11 balita) dan tertinggi tahun 2010 sebesar 0,032% (23 balita). Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Wonosobo tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Jumlah Balita Gizi Buruk Tahun 2010 – 2014**Kabupaten Wonosobo**

Indikator	Capaian Kerja				
	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Balita Gizi Buruk	23	22	19	11	13
Jumlah Balita	71.273	71.038	70.563	69.988	62.813
Prosentase Balita Gizi Buruk	0,032%	0,03%	0,026%	0,0157%	0,020%

Sumber : LPPD AMJ 2010-2015

: *Evaluasi Capaian Tahun Ketiga (2013) RPJMD*

Pada tahun 2010 hingga 2014 prosentase balita gizi buruk mengalami penurunan seiring dengan jumlah balita gizi buruk yang juga menurun. Penurunan tersebut terjadi karena berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk. Namun pada tahun 2014, prosentase balita gizi buruk meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah balita gizi buruk. Peningkatan prosentase gizi buruk disebabkan oleh pola asuh ibu terhadap anaknya, faktor ekonomi yang tidak mampu membeli makanan bergizi dan dapat pula disebabkan oleh penyakit balita.

c. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilan atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain sebagainya.

Tabel 2.5

Angka Kematian Ibu (AKI) 2011 – 2015 Kab. Wonosobo

Indikator	Capaian / Target	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kematian Ibu (AKI)	Capaian	112,72	129,07	84,25	85,38	84,33
	Target	114	111	108	105	102

Sumber : LPPD AMJ 2010-2015

: Evaluasi Capaian Tahun Ketiga (2013) RPJMD

Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2012 hingga mencapai 129,07, angka kematian ibu turun secara signifikan pada tahun 2013 menjadi 84,25. Akan tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2014 sebesar 1,34% atau nilai angka kematian Ibu sekitar 85,38 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tertinggi kematian ibu antara lain hipertensi, pendarahan, masih rendahnya deteksi dini kehamilan risiko tinggi oleh masyarakat dan masih kurangnya kesiapsiagaan keluarga dalam rujukan persalinan pada kehamilan risiko tinggi. Tahun 2015, angka kematian ibu menurun menjadi 84,33 tetapi masih tergolong tinggi. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat khususnya status kesehatan ibu masih perlu ditingkatkan.

2.1.3. Aspek Kependudukan

2.1.3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2014, tercatat penduduk Kabupaten Wonosobo sebanyak 754.052 jiwa. Jumlah ini mencakup penduduk bertempat tinggal tetap maupun tidak bertempat tinggal tetap. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Wonosobo di tahun tersebut sudah di atas 102,82. Ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Wonosobo lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Kemudian di tahun 2015, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo sebanyak 777.116 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 394.968 jiwa (masih lebih banyak daripada penduduk perempuan yang sebanyak 383.148 jiwa).

Dari data tersebut dapat kita ketahui laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014-2015 sebesar 0,50 atau 50%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010 – 2015 sebesar 2,51 atau 251% yang menandakan terjadinya pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Selbihnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Wonosobo Tahun 2010, 2014 , dan 2015**

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
Laki – Laki	383.305	372,789	393,968	2,51	0,50
Perempuan	372,789	381,263	383,148		
Jumlah	756.094	754.052	777,116		

Sumber : *BPS Kab. Wonosobo 2015 (data diolah)*

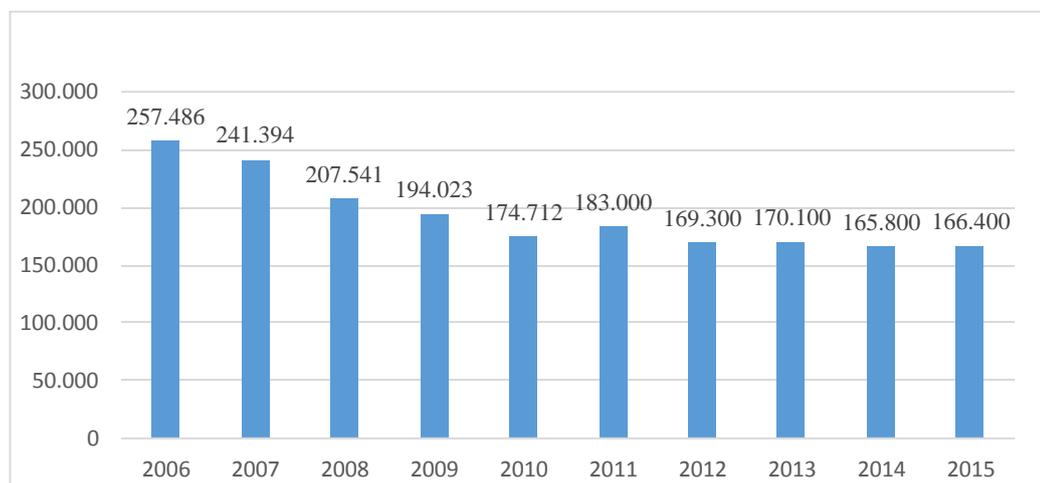
2.1.3.2. Kemiskinan

2.1.3.2.1. Tingkat Kemiskinan

Selama sepuluh tahun terakhir, persentase angka kemiskinan di Wonosobo mencapai angka tertinggi pada tahun 2006 sebesar 34,43% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 15,19%. Kemudian memasuki tahun 2010 - 2011, persentase angka kemiskinan mengalami kenaikan hingga 24,21% dan turun di tahun 2012-2014

mencapai 21,42%. Meskipun mengalami penurunan, persentase angka kemiskinan tersebut masih menempati peringkat tertinggi jauh di atas persentase jumlah penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah (13,19%) dan nasional (10,70%). Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo
Tahun 2006 – 2015



Sumber: BPS Kab. Wonosobo Tahun 2015

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo melonjak dari 169.300 jiwa pada tahun 2012 menjadi 170.100 jiwa pada tahun 2013 seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo dari tahun 2012 sebesar 765.189 menjadi 769.318 pada tahun 2013.

2.1.3.2.2. Data Mikro Kemiskinan

Data mikro kemiskinan berdasarkan PBDT 2015 adalah data kemiskinan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dari 2012 – 2014. PBDT 2015

ini dibuat oleh BPS dan mencakup rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, rumah tangga hampir miskin, dan rentan miskin lainnya yang dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga dapat digunakan untuk menyusun rumah tangga sasaran penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantuan Langsung Subsidi Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program pembagian beras untuk penduduk miskin (Raskin), Program Simpanan Keluarga Sejahtera 2015, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Penerima Bantuan Iuran (PBI) 2014 – 2015, dan sebagainya¹. Berdasarkan data PBDT Tahun 2015 jumlah rumah tangga miskin adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7. Jumlah Rumah Tangga Hasil PBDT 2015 per Kecamatan Kabupaten Wonosobo

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA					JUMLAH INDIVIDU				
		DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL	DESIL 1	DESIL 2	DESIL 3	DESIL 4	TOTAL
1	GARUNG	2143	2084	1588	1111	6926	11213	9131	6673	4863	31880
2	KALIBAWANG	668	887	834	538	2927	2857	3388	2871	2004	11120
3	KALIKAJAR	2890	2458	1691	1099	8138	15672	10678	6670	4526	37546
4	KALIWIRO	719	1411	1428	1207	4765	3315	5325	5120	4297	18057
5	KEJAJAR	1974	1949	1349	801	6073	9833	8139	5119	3192	26283
6	KEPIL	2321	2746	2106	1491	8664	11807	11366	8043	5898	37114
7	KERTEK	3028	2916	2140	1514	9598	16372	12972	8768	6208	44320
8	LEKSONO	563	907	931	942	3343	2984	3888	3712	3810	14394
9	MOJOTENGAH	2070	1875	1312	960	6217	11395	8299	5517	4173	29384
10	SAPURAN	2353	2444	1614	1044	7455	11675	9709	6106	4038	31528
11	SELOMERTO	710	1053	1109	1076	3948	3735	4550	4457	4311	17053
12	SUKOHARJO	630	801	672	519	2622	3296	3351	2760	2137	11544
13	WADASLINTANG	1500	2191	1827	1335	6853	6950	8163	6568	5068	26749
14	WATUMALANG	1975	1948	1246	673	5842	10066	7734	4474	2457	24731
15	WONOSOBO	950	1204	1259	1278	4691	5190	5465	5344	5208	21207
	TOTAL	24494	26874	21106	15588	88062	126360	112158	82202	62190	382910

Sumber: PBDT Kab. Wonosobo Tahun 2015

¹ BPS: Buku 1 *Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 – Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/ Kota*

Berdasarkan data PBDT 2015 jumlah penduduk miskin dengan kriteria sangat miskin, miskin, dan hampir miskin berjumlah 382.910 orang dengan asumsi setiap rumah tangga berjumlah 3-7 orang. Berdasarkan prioritas telah ditetapkan 48 desa dengan kriteria prioritas utama peningkatan kesejahteraan seperti tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8.
Desa Prioritas Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi²

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Rumah Tangga SM+M	Jumlah Rata	Presentase	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KALIKAJAR*	PURWOJIWO	489	818,11	59,77	1
2	KALIKAJAR*	KWADUNGAN	648	1107,84	58,49	3
3	KALIKAJAR*	WONOSARI	315	552,16	57,05	5
4	KALIKAJAR*	KARANGDUWUR	306	609,73	50,19	15
5	KALIKAJAR*	TEGALOMBO	463	940,81	49,21	18
6	KALIKAJAR*	LAMUK	397	940,81	42,20	39
7	KALIKAJAR*	BUTUH KIDUL	269	663,51	40,54	48
8	KEPIL*	PULOSAREN	666	1149,19	57,95	4
9	KEPIL*	GONDOWULAN	566	1080,81	52,37	10
10	KEPIL*	ROPOH	725	1426,49	50,82	12
11	KEPIL*	WARANGAN	258	511,35	50,45	14
12	KEPIL*	REJOSARI	148	320,54	46,17	23
13	KEPIL*	KALIWULUH	420	945,14	44,44	29
14	KEPIL*	KALIPURU	92	213,78	43,03	33
15	KEPIL*	TEGALGOT	258	608,92	42,37	38

² PBDT 2015 – Presentase RUTA Miskin Desil 1&2 2015

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	KEPIL*	TANJUNGANOM	347	823,51	42,14	40
17	KERTEK**	CANDIYASAN	584	1131,62	51,61	11
18	KERTEK**	PURBOSONO	380	767,84	49,49	17
19	KERTEK**	PAGEREJO	647	1370,27	47,22	21
20	KERTEK**	DAMARKASIAN	346	808,92	42,77	37
21	KERTEK**	KAPENCAR	606	1449,46	41,81	41
22	KERTEK**	RECO	825	2024,59	40,75	46
23	GARUNG *	JENGKOL	471	931,62	50,56	13
24	GARUNG *	GEMBLENGAN	450	1049,73	42,87	36
25	KEJAJAR*	SURENGEDE	523	940,54	55,61	7
26	KEJAJAR*	CAMPURSARI	304	665,14	45,70	24
27	KEJAJAR*	IGIRMRANAK	81	181,62	44,60	27
28	KEJAJAR*	TIENG	502	1168,92	42,95	34
29	KEJAJAR*	TAMBI	613	1483,78	41,31	43
30	KEJAJAR*	SIKUNANG	244	595,95	40,94	44
31	MOJOTENGAH**	SLUKATAN	535	1010,81	52,93	9
32	MOJOTENGAH**	DERODUWUR	480	961,62	49,92	16
33	MOJOTENGAH**	SOJOPURO	306	681,08	44,93	25
34	MOJOTENGAH**	CANDIREJO	169	407,03	41,52	42
35	SAPURAN*	RIMPAK	617	1038,65	59,40	2
36	SAPURAN*	BATURSARI	585	1046,49	55,90	6
37	SAPURAN*	TEMPURANDUWUR	423	771,35	54,84	8
38	SAPURAN*	NGADIKERSO	356	742,70	47,93	20
39	SAPURAN*	NGADISALAM	250	572,16	43,69	31
40	SAPURAN*	TALUNOMBO	222	545,95	40,66	47
41	WADASLINTANG**	PANERUSAN	321	748,38	42,89	35

(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	WATUMALANG*	MUTISARI	201	433,78	46,34	22
43	WATUMALANG*	KRINJING	552	1229,73	44,89	26
44	WATUMALANG*	WONOKAMPIR	490	1098,92	44,59	28
45	WATUMALANG*	PASURUHAN	342	769,73	44,43	30
46	WATUMALANG*	KALIDESEL	212	488,11	43,43	32
47	WATUMALANG*	LUMAJANG	415	1017,84	40,77	45
48	WONOSOBO***	TLOGOJATI	389	797,30	48,79	19

Sumber: PBDT Kab. Wonosobo Tahun 2015

Keterangan : * Kecamatan dan desa prioritas 1

** Kecamatan prioritas 2 namun ada desa dengan prioritas 1

*** Kecamatan prioritas 3 namun ada desa dengan prioritas 1

2.1.3.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan aspek manusia dalam suatu wilayah tertentu yang standarnya ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDP (*United Nation Development Programme*). Ukuran ini selanjutnya disepakati dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu, seperti negara, propinsi atau kabupaten/ kota. pada dasarnya, IPM menetapkan standar-standar minimal yang sangat sederhana sehingga dapat dikatakan sebagai prasyarat minimal yang harus dicapai oleh suatu negara atau wilayah pada kurun waktu tertentu. Nilai IPM berkisar antara “0” sampai dengan “100”. Artinya semakin rendah nilai IPM suatu wilayah/negara berarti semakin lemah/tertinggal pembangunan wilayah atau negara tersebut. Di

Kabupaten Wonosobo, perkembangan nilai IPM sejak tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 – 2015

No.	Tahun	Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Rata-rata Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (ribu Rupiah per orang per tahun)	IPM
		(tahun)	(tahun)	(tahun)		
01.	2010	70,37	5,81	9,96	9.032,28	62,50
02.	2011	70,50	5,87	10,09	9.274,72	63,07
03.	2012	70,63	5,90	10,83	9.403,93	64,18
04.	2013	70,76	5,92	11,03	9.458,32	64,57
05.	2014	70,82	6,07	11,34	9.491,02	65,20
06.	2015	71,02	6,11	11,43	9,74	65,70

Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo. 2015

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa di setiap komponen penilaian Indeks, semuanya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut tentunya berpengaruh juga terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2010 hingga 2015. Tahun 2010 dan 2011 IPM di Kabupaten Wonosobo dikategorikan rendah karena berada di bawah nilai 64. Sementara di tahun 2012 – 2015 terjadi peningkatan sampai di atas nilai 64 sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM di Kabupaten Wonosobo termasuk kategori tinggi.

2.2. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo

2.2.1. Kedudukan dan Susunan Organisasi

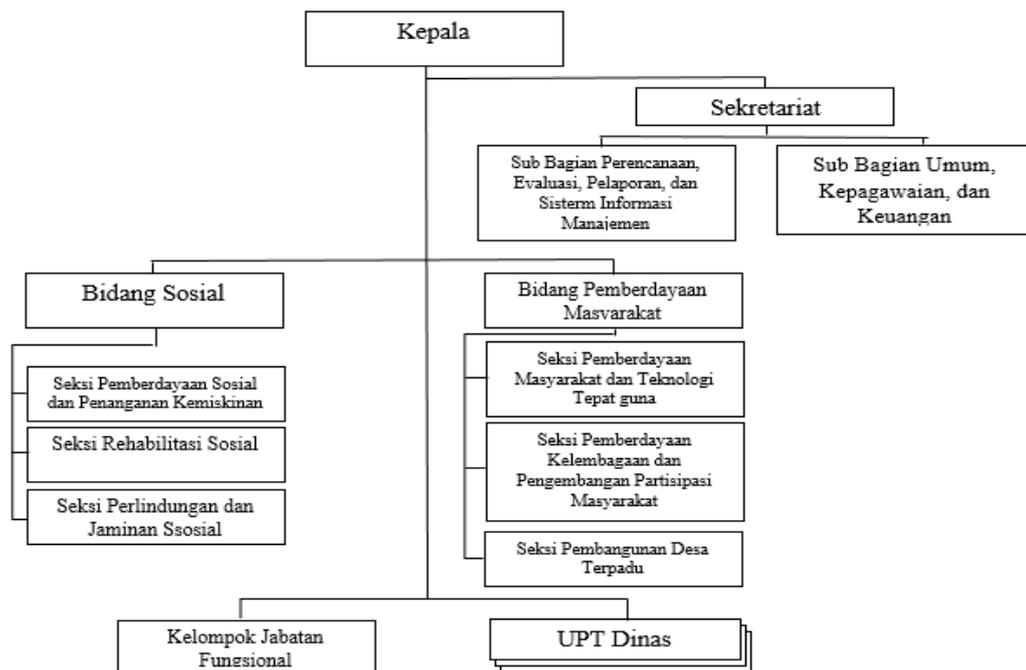
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa. Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagan 2.2.

Bagan Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Wonosobo



Sumber: Dinsos PMD Kab. Wonosobo Tahun 2017

2.2.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan;
- f. Pelayanan dan rehabilitasi sosial serta pelaksanaan bantuan dan jaminan sosial;
- g. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa
- h. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- i. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang sekarang disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam istilah internasional dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)*.

2.3.1. Tujuan

Secara umum, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan lebih khususnya, PKH bertujuan untuk meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, memastikan terpeliharanya kesejahteraan sosial dan mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH.

2.3.2. Ketentuan Peserta PKH

Keluarga Penerima Manfaat/ Peserta PKH adalah Keluarga Miskin yang memenuhi minimal satu kriteria dari tiga komponen sebagai berikut :

- a. Komponen Kesehatan meliputi ibu hamil atau nifas, balita (anak usia 0 – 5 tahun), dan Anak Pra Sekolah/ Apras (anak usia 5 – 7 tahun).
- b. Komponen Pendidikan meliputi anak SD atau sederajat (usia 7 – 12 tahun), anak SMP atau sederajat (usia 13 – 15 tahun), dan anak SMA atau sederajat (usia 16 – 18 tahun).
- c. Komponen Kesejahteraan Sosial yaitu lanjut usia 70 tahun ke atas, Penyandang Disabilitas Berat (PDB), dengan kriteria sudah tidak dapat lagi direhabilitasi, membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas normal.

2.3.3. Hak, Kewajiban, dan Sanksi bagi Peserta PKH

Dalam tabel di bawah ini, akan diuraikan hak-hak, kewajiban, dan sanksi bagi peserta PKH (yang melanggar komitmen).

Tabel 2.10.

Kewajiban, Hak, dan Sanksi bagi peserta PKH (yang melanggar komitmen)

Komponen PKH	Kewajiban	Hak
(1)	(2)	(3)
Ibu Hamil/ Nifas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak 4 kali dalam trimester - Melahirkan oleh tenaga kesehatan di faskes - Pemeriksaan kesehatan 2 kali sebelum bayi usia 1 bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program. - Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya. - Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas* dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya
Bayi	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 0 – 11 bulan: imunisasi lengkap serta pemeriksaan berat badan setiap bulan. - Usia 6 – 11 bulan: mendapat suplemen vitamin A 	
Balita	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 1 – 5 tahun: imunisasi tambahan dan pemeriksaan berat badan setiap bulan. - Usia 5 – 6 tahun: pemeriksaan berat badan setiap bulan dan mendapat vit A sebanyak 2 kali setahun. - Usia 6 – 7 tahun: timbang berat badan di faskes. 	
Anak Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD/SMP/SMA) - Terdaftar di sekolah/ pendidikan kesetaraan minimal 85% kehadiran di kelas 	

(1)	(2)	
Lansia 70 Tahun Keatas	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia) - Mengikuti kegiatan sosial (day care dan home care) 	
Penyandang Disabilitas Berat (PDB)	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan - Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care) 	
Sanksi Bagi Peserta PKH yang Melanggar Komitmen		
<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan bantuan adalah 10 % setiap bulannya sebelum penyaluran periode berikutnya. - Peserta tidak memperoleh bantuan jika seluruh komponen anggota tidak melaksanakan kewajiban selama 3 bulan berturut-turut. - Peserta PKH yang seluruh komponen anggotanya dalam enam bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen maka disamping bantuan tidak akan diberikan, dia juga akan dikeluarkan dari peserta PKH. 		

Sumber: Buku Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2015

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan tidak secara cuma-cuma melainkan menuntut pesertanya untuk menaati komitmen-komitmen yang dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, peserta PKH juga memiliki hak untuk mendapatkan program komplementaritas yang meliputi Program Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, Program RASTRA/ Beras Sejahtera, Program RUTILAHU, dan KUBE. Hal ini karena seluruh peserta PKH adalah keluarga miskin atau 13% terbawah pada BDT yang berhak atas program komplementaritas bantuan dan perlindungan sosial yang lain.

2.3.4. Index Bantuan PKH

Index Bantuan PKH adalah besaran nominal bantuan yang diberikan kepada masing-masing komponen penerima bantuan Program Keluarga Harapan. berikut adalah rinciannya :

Tabel 2.11. Index Bantuan PKH

Komponen Bantuan	Bantuan Per Tahun (RP)
Bantuan Tetap	500.000,00
Bantuan Ibu hamil/nifas/menyusui	1.200.000,00
Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	1.200.000,00
Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI/ sederajat	450.000,00
Bantuan peserta pendidikan SMP/MTs/ sederajat	750.000,00
Bantuan peserta pendidikan SMA/MA/ atau sederajat	1.000.000,00
Bantuan Penyandang Disabilitas Berat	3.100.000,00
Bantuan Lanjut Usia 70 tahun ke atas.	1.900.000,00

Sumber : *SK Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2016*

Keterangan :

1. Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3 anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan.
2. Bantuan komponen peserta PKH diberikan dengan jumlah nominal terbesar dari komponen kepesertaan
3. Bantuan untuk komponen kesehatan, kehamilan keempat dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan.

Indeks bantuan tersebut berlaku sejak diimplementasikannya Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali hingga tahun 2016. Mulai tahun 2017, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disamakan menjadi Rp.1.900.000,- / tahun yang akan disalurkan sebanyak 4 kali. Penyaluran pertama sebesar Rp 500.000, kedua Rp 450.000, ketiga Rp 500.000, dan keempat Rp 450.000. Penyeimbangan besaran ini dilakukan setelah dilakukan sinergitas antarkementerian. Pasalnya, beberapa komponen dalam PKH telah diberikan melalui bantuan lain, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

1.4. Deskripsi Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Wonosobo

1.4.1. Kedudukan dan Wewenang UPPKH Kabupaten Wonosobo

Unit Pelaksana PKH (UPPKH) Kabupaten dibentuk di setiap Kabupaten/Kota dimana Program Keluarga Harapan dilaksanakan. UPPKH Kabupaten/Kota merupakan kunci mensukseskan pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH Kecamatan dengan UPPKH Pusat serta Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota.

Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Wonosobo terdiri atas 1 (satu) koordinator kabupaten, 8 (delapan) orang operator, dan 156 pendamping yang tersebar di 15 kecamatan yang menerima PKH. Jumlah pendamping di setiap UPPKH Kecamatan disesuaikan dengan jumlah peserta PKH yang terdaftar di kecamatan tersebut. Satu orang pendamping akan mendampingi dengan rasio 150 sampai 375 RTSM peserta PKH yang disesuaikan menurut kondisi daerah. Untuk setiap UPPKH kecamatan terdapat sekitar 3 – 14 pendamping dan diangkat satu orang sebagai koordinator kecamatan. Pendamping terbanyak terdapat di Kecamatan Kertek dan berjumlah 14 pendamping dan tersedikit di Kecamatan Leksono berjumlah 3 pendamping.

1.4.2. Tugas Pokok dan Fungsi UPPKH Kabupaten Wonosobo

Dalam kegiatan sehari-hari, UPPKH Kabupaten Wonosobo memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab dalam berbagai penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kabupaten Wonosobo
- b. Melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan PKH di tingkat Kabupaten.
- c. Menerima dan melakukan data entri atas semua pengaduan dan membantu penyelesaian yang dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota
- d. Menerima dan melakukan data entri atas klarifikasi data peserta & pemutakhiran data peserta.
- e. Menerima dan memproses hasil verifikasi komitmen peserta.
- f. Memastikan Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Komitmen Peserta.
- g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan sosialisasi PKH .
- h. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Pendidikan untuk memantau ketersediaan fasilitas dalam pertemuan bulanan.
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan monitoring PKH
- j. Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan PKH ditingkat Kabupaten kepada Pelaksana PKH Provinsi dan Pelaksana PKH tingkat Pusat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/01/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kabupaten/Kota di Provinsi Pelaksana PKH Tahun 2015, terdapat penambahan Kabupaten Peserta PKH di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Boyolali.

